

## BAB III

### PENUTUP

#### **A. Kesimpulan**

1. ORI DIY merupakan sebuah Lembaga negara yang bertugas melakukan pengawasan terhadap layanan publik salah satunya adalah pelayanan jasa yang salah satunya terkait dengan pendidikan. Masalah Pendidikan yang selalu masuk menjadi laporan ORI DIY adalah mengenai Pengadaan Pakaian Seragam terutama SMAN/ SMKN. Dalam hal ini ORI DIY telah melaksanakan pengawasannya dengan baik yaitu dengan cara Pengawasan preventif dan Pengawasan represif.
2. Hambatan yang terjadi selama ORI DIY melakukan pengawasan terkait pelanggaran pengadaan pakaian seragam terutama di SMAN/ SMKN adalah tingkat kepatuhan sekolah terhadap peraturan yang berlaku masih rendah, sehingga masih banyak sekolah yang terus-menerus melakukan pelanggaran. Lebih lanjut, bahwa kurangnya pengawasan internal dan penegakan sanksi yang kurang tegas dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain itu, masih adanya stigma dari sekolah yang menganggap bahwa melakukan pengadaan pakaian seragam adalah hal yang wajar karena itu merupakan “tradisi” yang dilakukan selama beberapa tahun. Namun, ORI DIY melakukan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran hukum dan kepatuhan hukum kepada sekolah-sekolah terutama SMAN/SMKN. Lebih lanjut, ORI DIY masih terus mengawasi kinerja dan meminta keterangan mengenai perkembangan langkah-langkah penyelesaian dan pencegahan yang telah dilakukan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa

Yogyakarta dalam mencegah kasus pelanggaran pengadaan pakaian seragam sekolah.

## **B. Saran**

1. ORI DIY harus terus menggalakkan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran hukum bagi sekolah-sekolah khususnya SMAN/ SMKN tentang larangan melakukan pengadaan pakaian seragam.
2. DISDIKPORA DIY sebaiknya melakukan pengawasan secara maksimal dan penegakkan hukum yang lebih tegas berupa sanksi yang memberikan efek jera kepada “oknum sekolah” yang melakukan pelanggaran terkait pengadaan pakaian seragam khususnya SMAN/ SMKN. Hal tersebut tentu akan meminimalisir pelanggaran pengadaan pakaian seragam, sehingga di tahun-tahun berikutnya jumlah sekolah yang melakukan pelanggaran akan semakin sedikit atau bahkan sudah tidak dijumpai lagi pelanggaran tersebut.
3. Pemerintah DIY sebaiknya mengeluarkan regulasi yang mengatur secara tegas mengenai pihak yang memiliki kewenangan dalam menjatuhkan sanksi pelanggaran pengadaan pakaian seragam, selain itu mestinya Pemerintah DIY juga mengeluarkan regulasi yang mencakup mengenai kode warna pada setiap seragam, sehingga tidak ada lagi keresahan sekolah karena murid-muridnya menggunakan seragam dengan warna tone yang berbeda. Dengan dikeluarkannya kode warna pada setiap seragam, tentunya setiap toko seragam akan menjual seragam dengan warna yang seragam sehingga hal tersebut dapat dijangkau oleh orang tua atau wali Peserta Didik dengan mudah.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Ernie Tisnawati, dkk. 2005. *Pengantar Manajemen*. Prenada Media Jakarta. Jakarta.
- H. Kriswahyu, dkk. 2017. *Standar Pelayanan Publik Sesuai UU No 25 Tahun 2009 Survei Ombudsman RI*. Ombudsman Republik Indonesia. Jakarta.
- H. Nurtjahjo, dkk. 2013. *Memahami Maladministrasi*. Ombudsman Republik Indonesia. Jakarta.
- Ismail Nurdin. M., 2019, *Kualitas Pelayanan Publik (Perilaku Aparatur Dan Komunikasi Birokrasi Dalam Pelayanan Publik)*, Media Sahabat Cendekia, Surabaya.
- Kamaruddin Sellang, dkk. 2019. *Strategi Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (Dimensi, Konsep, Indikator, Dan Implementasinya)*. Cv. Penerbit Qiara Media. Pasuruan.
- Maringan Masry Simbolon. 2004. *Dasar-dasar Administrasi dan Manajemen*. Ghalia. Jakarta.
- Mexsasai Indra, dkk. 2021. *Hukum Administrasi Negara*. Laboratorium Komunikasi & Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji. Tanjungpinang.
- Novianty Djafri, 2018, *Manajemen Pelayanan (Berbasis Revolusi Mental)*, Ideas Publishing, Gorontalo.
- Rahman Mulyawan, 2016, *Birokrasi dan Pelayanan Publik*, UNPADPRESS, Sumedang.
- Ridwan HR, 2018, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Victor M. Situmorang, dkk. 1993. *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*. Rineka Cipta. Jakarta.

### Jurnal:

- Erwan Agus Purwanto, dkk. 2017. *Modul Pelatihan Dasar Calon PNS: Pelayanan Publik*. Lembaga Administrasi Negara. Jakarta.
- Fobi Habibillah, dkk. 2022. “Efektivitas Peran Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat Dalam Pengawasan Pelayanan Publik Pada Kantor Pertanahan Kota Padang”. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)*, Vol. 6, Nomor 2 Maret 2022, Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala.
- Farah Fadila, dkk. 2022. “Peran Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat Dalam Penyelesaian Laporan Maladministrasi Bidang Pendidikan Di Kota Padang”. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)*, Vol. 6, Nomor 3 Juli 2022, Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala.
- Zuhra Savitri, dkk. 2019. “Optimalisasi Peran Ombudsman Aceh Dalam Upaya Pencegahan Maladministrasi Kepegawaian Pada Dinas Pendidikan Aceh”. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah*, Volume 4, Nomor 2, Mei 2019, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala.
- Satriyo Arun Samudro. 2023. “Eksistensi Dan Optimalisasi Peran Ombudsman Dalam Pencegahan Maladministrasi Di Indonesia”. *Yustisi Jurnal Hukum & Hukum Islam*, Vol. 10, Nomor 2 Juni 2023, Universitas Ibn Khaldun Bogor.

### **Internet:**

Anugrahdwi, “Pengertian dan Prinsip-Prinsip Pada Manajemen Pelayanan Publik”, Pascasarjana UMSU, <https://pascasarjana.umsu.ac.id/pengertian-dan-prinsip-prinsip-pada-manajemen-pelayanan-publik>, diakses tanggal 1 November 2023 pukul 01.03 WIB

Badan Pusat Statistik, Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin tahun 2022

[https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view\\_data\\_pub/0000/api\\_pub/YW40a21pdTU1cnJxOGt6dm43ZEdoZz09/da\\_03/1](https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view_data_pub/0000/api_pub/YW40a21pdTU1cnJxOGt6dm43ZEdoZz09/da_03/1), diakses pada tanggal 05 April 2023 pukul 12.02 WIB.

Hadid Husaini, “Ombudsman DIY Temukan Sekolah Membuka Pengadaan Seragam” Harian Jogja, <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2023/07/03/511/1140650/ombudsman-diy-temukan-sekolah-membuka-pengadaan-seragam>, diakses tanggal 2 Oktober 2023 pukul 10.21 WIB

Kgs Chris Fither, “Strategi Percepatan Penyelesaian Laporan Masyarakat di Wilayah Kepulauan” <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--strategi-percepatan-penyelesaian-laporan-masyarakat-di-wilayah-kepulauan>, diakses tanggal 1 Oktober 2023 pukul 09.02 WIB

Ombudsman Republik Indonesia, “Meski Dilarang, Sejumlah Sekolah di DIY Masih Jualan Seragam” <https://ombudsman.go.id/perwakilan/news/r/pwkmedia--meski-dilarang-sejumlah-sekolah-di-diy-masih-jualan-seragam>, diakses tanggal 17 September 2023 pukul 17.25 WIB

Ombudsman Republik Indonesia, “Profil Ombudsman Republik Indonesia”, <https://ombudsman.go.id/profiles/index/pfft>, diakses tanggal 17 September 2023 pukul 19.02 WIB

Reni Yunita Ariany, Awas-Mengawasi dalam Pelayanan Publik, Ombudsman Republik Indonesia <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--awas-mengawasi-dalam-pelayanan-publik#:~:text=>, diakses tanggal 17 September 2023 pukul 05.02 WIB

Yulianta Saputra, Fungsi Pengawasan Lingkup Hukum Administrasi Negara, UIN Sunan Kalijaga <https://ilmuhukum.uin-suka.ac.id/id/kolom/detail/442/fungsi-pengawasan-lingkup-hukum-administrasi-negara>, diakses tanggal 17 September 2023 pukul 04.59 WIB

### **Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301.

Undang-Undang Nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4899.

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5038.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5105.

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5357 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215.
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6178.
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6.
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pakaian Seragam Sekolah bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 893.
- Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Pakaian Seragam Sekolah Bagi Peserta Didik Pendidikan Menengah Dan Pendidikan Khusus. Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 13 dan Tambahan Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 13.
- Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan, Dan Penyelesaian Laporan. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1035.
- Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Investigasi Atas Prakarsa Sendiri. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1072.
- Keputusan Ketua Ombudsman Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Pedoman Klasifikasi Laporan Masyarakat Di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia.